



PERBANDINGAN SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA DARI MASYARAKAT MAJEMUK KE MASYARAKAT MULTIKULTURAL

¹Saddam, ²Ilmiawan Mubin, ³Dian Eka Mayasari S.W., ⁴Naning Dwi Sulystyaningsih,
⁵Ismi Arifiana Rahmandari, ⁶Risdiana

¹Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia,
saddamalbimawi@gmail.com

^{2,3}Pendidikan Sejarah, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia,
²awanilmi106@gmail.com, ³dianekamayasari30s@gmail.com

⁴Prodi Budidaya Perairan, Universitas 45 Mataram, nonaning11@gmail.com

⁵Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas 45 Mataram, ismiarifiana67@gmail.com

⁶Prodi Ilmu Hukum, Universitas 45 Mataram, risa68843@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 20-11-2020

Direvisi : 24-12-2020

Disetujui : 26-12-2020

Online : 27-12-2020

Kata Kunci:

Perbandingan
Sosial Budaya
Majemuk
Multikultural

Keywords:

Comparison
Social Culture
Compound
Multicultural

ABSTRAK

Abstrak: Tujuan penulisan menyajikan konsep ke-Indonesia-an secara menyeluruh sejak sebelum merdeka hingga setelah kemerdekaan. Mengkaji sistem sosial budaya Indonesia zaman penjajahan Belanda dan setelah kemerdekaan dari konsep masyarakat mejemuk dan masyarakat multikultural. Penelitian ini menggunakan *library research*. Data dikumpulkan menggunakan dokumentasi berupa buku, makalah, artikel, dan jurnal relevan. Analisis data menggunakan *content analysis*, untuk mendapatkan infensi valid dan dapat diteliti kembali berdasarkan konteksnya. Pengecekan antar pustaka dan membaca kembali pustaka dilakukan guna menjaga keaslian dan kesalahan hasil kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa penjajahan Belanda selalu diupayakan memperkuat dan membentuk lagi masyarakat Indonesia berdasarkan habituasi masing-masing antar suku, budaya, agama, dan adat-istiadat. Belanda menggunakan potensi yang ada dalam masyarakat untuk memperkuat maksud tertentu, hingga mengarahkan masyarakat Indonesia memperkuat kemajemukan. Masyarakat majemuk merupakan suatu masyarakat yang hidup secara berkelompok secara terpisah berdasarkan suku, agama, ras dan kelas sosial dengan corak khas tertentu. Rasialis menjadi hal yang dilestarikan dalam masyarakat majemuk secara mendasar. Masyarakat multikultural adalah suatu kondisi masyarakat majemuk yang telah tercapai sebuah keteraturan dan keharmonisan dalam masyarakat, dengan banyaknya diferensiasi sosial masyarakat tercipta suatu keharmonisan, saling menghargai, kesederajatan dan mempunyai kesadaran tanggungjawab sebagai satu kesatuan.

Abstract: *The purpose of writing presents the concept of Indonesia as a whole from before independence until after independence. Reviewing the Indonesian socio-cultural system during the Dutch colonial era and after independence from the concept of a rich society and multicultural society. This study uses library research. Data is collected using documentation in the form of books, papers, articles, and relevant journals. Data analysis uses content analysis, to obtain valid inferences and can be re-examined based on the context. Checking between libraries and rereading libraries is done to maintain the authenticity and errors of the study results. The results showed that during the Dutch colonial period was always sought to strengthen and reshape Indonesian society based on their respective habituation between tribes, cultures, religions, and customs. The Dutch used the potential in society to strengthen certain intentions, to direct the Indonesian people to strengthen diversity. Compound society is a society that lives in groups separately based on ethnicity, religion, race, and social class with a certain distinctive pattern. Racists are fundamentally preserved in compound society. A multicultural society is a condition of compound society that has been achieved a regularity and harmony in society, with much social differentiation of the community created a harmony, mutual respect, equality and*



<https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.3424>



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

A. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai suatu bangsa yang berperadaban memiliki sejarah yang sangat panjang. Indonesia terbangun secara struktural dari kelompok-kelompok masyarakat yang semula memiliki struktur tersendiri (Ruslan, 2020). Persatuanpun dicanangkan dalam bentuk membela bangsa-bangsa (sekarang suku bangsa) dengan prinsip kesatuan sekitar wilayah yang memiliki kesamaan nasib dan sepenanggungan. Hingga terbentuk suatu Negara-bangsa dari suku-suku bangsa yang majemuk.

Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia telah menguraikan warna seperti apa, bagaimana, dan mengapa perjuangan itu perlu dilakukan. Namun, dalam perjalanannya meskipun suatu Negara telah menyatakan kemerdekaan secara *de facto*, perlu juga diakui oleh Negara lain sebagai negara merdeka. Hal tersebut sebagai bentuk bahwa Negara tersebut telah mengakui secara hukum internasional keberadaan Negara-bangsa tersebut sebagai suatu Negara. Pertempuran yang terjadi dimasa sebelum kemerdekaan ataupun setelah kemerdekaan, telah memberi gambaran tentang konflik suatu bangsa dalam mempertahankan suku bangsa hingga menjadi bangsa yang besar. Peristiwa tersebut merupakan rentetan konflik yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia, hingga tepat pada 17 Agustus 1945 Negara-bangsa ini menyatakan diri merdeka sebagai hasil perjuangan yang amat panjang. Lembaran sejarah kehidupan bangsa Indonesia-pun tercipta dari rangkain panjang yang berpuncak pada proklamasi kemerdekaan.

Sebelum dan sesudah itu, bangsa Indonesia mengalami pertentangan-pertentangan, yang muncul justru dari para tokoh elit sosial politik bangsa. Semua saling membantu untuk mewujudkan Indonesia merdeka, tanpa mengedepankan hasrat keegoisan masing-masing. Namun, pasca proklamasi kemerdekaan muncul pula peristiwa pemberontakan,

yang diawali dengan pemberontakan yang satu ke pemberontakan yang lain, sebagai usaha meruntuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penyadaran diri akan kehidupan sebelum dan sesudah kemerdekaan perlu ditanamkan, agar timbul rasa ada dalam diri sebagai bagian dari Negara-bangsa ini. Sayangnya yang belum pernah kita sadari adalah mekanisme psikologis di luar itu akan membawa kita berlarut-larut ke dalam konflik yang berkepanjangan, dan sulit untuk dipecahkan. Hal ini menyebabkan kehilangan kepekaan terhadap perkembangan-perkembangan yang dapat memecahkan konflik. Dengan menyadari adanya konflik-konflik sosial yang bersifat laten di dalam masyarakat, memungkinkan masyarakat dapat mencari faktor-faktor penyebabnya.

Faktor-faktor penyebab tersebut perlu dipahami pada konteks yang sebenarnya, agar diketahui, dimengerti, dan ditanamkan dalam diri sebagai nilai kejuangan yang akan membawa semua elemen bangsa dan individu-individu dalam Negara ini pada perlunya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Negara-bangsa ini (Noorzeha, Fil, Noorzeha, & Fil, 2020). Masyarakat majemuk dan masyarakat multikultur adalah dua istilah yang dicanangkan untuk memahami masyarakat yang bersuku-suku, beretnis-etnis, beragam agama, bahasa, dan tradisi dalam tatanan sosial (Suparlan, 2014). Untuk mengurai ke dalam konsep-konsep dasar bentuk dan isi dari kemajemukan sistem sosial budaya Indonesia.

Dengan demikian, menggali kembali konsep sistem sosial dan sistem budaya, dilanjutkan dengan realitas struktur majemuk masyarakat Indonesia yang membawa bangsa ini menjadi bangsa yang multikultural. Aspek historis sangat mempengaruhi terbentuknya sistem sosial dan sistem budaya Indonesia. Dengan ini konsep Negara Indonesia harus dipahami secara total dan atau

menyeluruh dari zaman pra-sejarah hingga pada zaman pasca kemerdekaan.

Tujuan penulisan paper ini adalah untuk mencari dan menganalisis perbandingan sistem sosial budaya Indonesia pada zaman penjajahan belanda dan setelah kemerdekaan. Dari segi perubahan masyarakat dari masyarakat majemuk ke masyarakat multikultural, untuk menyajikan konsep ke-Indonesia-an secara menyeluruh yang dilihat dari jaman pra-kemerdekaan hingga pada jaman kemerdekaan, yang digali dari konsep masyarakat mejemuk dan masyarakat multikultural.

B. METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan *library research*. Digunakan untuk mengkaji, menganalisis, dan menggali sumber-sumber yang berkaitan dengan data penelitian. Dengan kata lain dikenal dengan riset pustaka. Riset pustaka adalah bagaimana memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian (Zed, 2014). Tegasnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan (Zed, 2014); (Khatibah, 2011). Studi kepustakaan juga dapat mempelajari beberapa buku referensi dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan, berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Mirzaqon T, 2017). Sedangkan menurut dua ahli lain bahwa studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang dalam situasi sosial yang sedang diteliti (Umanailo, Nawawi, & Pulhehe, 2018); (Sugiyono, 2013).

Riset pustaka digunakan untuk mengkaji, menganalisis dan menggali perbandingan sistem sosial budaya Indonesia pada zaman penjajahan belanda dan setelah kemerdekaan. Dari segi perubahan masyarakat dari masyarakat majemuk ke masyarakat multicultural. Hal ini guna menyajikan konsep ke-Indonesia-an secara menyeluruh yang dilihat dari dan pada pra-kemerdekaan hingga pada jaman kemerdekaan, yang digali dari konsep masyarakat mejemuk dan masyarakat multikultural.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang menjadi bahan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, dan bahan kajian terkait lainnya yang bersumber dari internet. Adapun yang menjadi sumber data penelitian terdiri dari 15 buku, dan 20 jurnal.

3. Teknik Pengumpulan Data

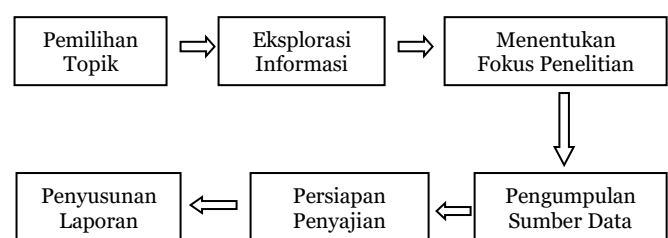
Mengingat ini merupakan *library research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah ada. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (Al-Ghaaruty, 2010; Farida, 2010; Rahardjo, 2010). Dokumen tulisan diantaranya adalah catatan harian, cerita, biografi, peraturan, dan cerita sejarah sedangkan dokumen yang berbentuk gambar contohnya gambar hidup, foto, sketsa dan lain-lain (Sugiyono, 2014). Dokumentasi yaitu mencari data terkait yang berupa catatan, buku, makalah, atau artikel, jurnal dan sebagainya (Suharsimi, 2013).

Instrument penelitian yang digunakan berupa daftar *check-list* klasifikasi bahan yang digunakan dalam penelitian, catatan penelitian, dan skema penulisan. Instrument ini juga digunakan untuk pemetaan langkah-langkah dan alur penelitian.

4. Prosedur Penelitian

Library Research digunakan untuk menyusun konsep *Expressive Writing* yang digunakan sebagai pijakan mengembangkan langkah-langkah praktis sebagai alternative pendekatan konseling. Langkah-langkah penelitian kepustakaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) pemilihan topik;
- 2) eksplorasi informasi;
- 3) menentukan fokus penelitian;
- 4) pengumpulan sumber data;
- 5) persiapan penyajian data;
- 6) penyusunan laporan.



Gambar 1. Langkah-langkah Penelitian Kepustakaan (Mirzaqon T, 2017).

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan *content analysis*. *content analysis* digunakan untuk mendapatkan informasi yang valid dan bisa diteliti kembali berdasarkan konetksnya (Giannantonio, 2010; Krippendorff, 2010; Shelley & Krippendorff, 1984). Analisis dilakukan dengan dalam proses memilih, membandingkan, menggabungkan dan memilah berbagai pengertian hingga ditemukan yang relevan (Mirzaqon T, 2017). Menurut Sutanto untuk menjaga kesesuaian pengkajian atau mencegah dan mengatasi kekelituan atau kesalahan manusiawi yang bisa terjadi karena kekurangan penulis pustaka, maka perlu dilakukan pengecekan antar pustaka dan memperhatikan komentar pembimbing (Gani & Saddam, 2020; Mirzaqon & Purwoko, 2017; Rani & Purwoko, 2012).

Dengan ini, analisis yang digunakan adalah *content analysis*. Yakni dengan memilih, membandingkan, menggabungkan dan memilah sumber pustaka tentang sistem sosial-budaya Indonesia zaman penjajahan belanda dan setelah kemerdekaan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Masyarakat Majemuk-Multikultur

Masyarakat majemuk dan multikultural serta ke mana suatu Negara atau bangsa Indonesia tergolong merupakan suatu tema yang menarik untuk dibahas. Tidak tekecuali Indonesia dengan slogan “Bhinneka Tunggal Ika” yang dicengkeram oleh Garuda, burung lambang NKRI.

Kehidupan sosial-budaya masyarakat yang cenderung mudah diamati masyarakat dunia seperti sekarang cenderung relevan dengan pemikiran para pendiri republik ini. Terlihat semacam modifikasi dan revitalisasi perkiran atas kebhinekaan dalam bentuk penghargaan terhadap kragaman dan perbedaan budaya. Multikulturalisme sebagai sebuah paham melahirkan masyarakat madani yang demokratis, menghargai hak asasi manusia berikut budayanya (Wasino, 2011, 2015). Lebih lanjut Malinowski mengatakan bahwa semua aktivitas kebudayaan itu berfungsi untuk memenuhi suatu rangkaian hasrat naluri dari manusia (Koentjaraningrat, 2010).

Melihat Negara kita Indonesia memiliki beragam primordial antara denotasi majemuk dan multikultural. Dalam msayarakat multikultural, etnis-etnis yang memiliki perbedaan setara posisinya dalam proses hidup dan berpolitik di dalam NKRI. Sebaliknya konsepsi masyarakat majemuk mengandung makna bias konsep dominasi etnis atau ras tertentu dalam kehidupan sosial dan politik negara Indonesia.

Masyarakat majemuk terbentuk dari dipersatukannya masyarakat-masyarakat suku bangsa oleh sistem nasional, yang biasanya dilakukan *by force* menjadi sebuah bangsa dalam wadah negara (Suparlan, 2014). Multikulturalisme yaitu sebuah ideologi yang menekankan pengharagaan dan pengakuan akan kesederajatan perbedaan kebudayaan dalam masyarakat. Kebudayaan yang mencakup para pendukung kebudayaan, baik secara individual maupun kelompok, dan terutama ditujukan terhadap golongan sosial askriptif. Multikulturalisme secara bergandengan tangan saling mendukung dengan proses-proses demokratisasi, pada dasarnya merupakan kesederajatan pelaku secara individual (HAM) dalam berhadapan dengan kekuasaan dan masyarakat setempat (Suparlan, 2004).

Untuk itu, akan ditelusuri sejumlah teori sosial berkenaan dengan konsep majemuk dan multikultur masyarakat. Ini guna mencari pijakan teoretis dalam melakukan counter theory terhadap hegemoni konsep masyarakat majemuk dalam studi-studi sosial dan politik Indonesia. Dengan ini, terlebih dahulu kita memahami tentang masyarakat majemuk juga masyarakat multikultur.

a) Masyarakat Majemuk

Menurut Geertz majemuk adalah masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam sub-sub sistem yang kurang lebih berdiri sendiri, masing-masing sub sistem terikat dalam oleh ikatan-ikatan yang bersifat primordial (Nasikun, 2003); (Wafi, 2017). Masyarakat majemuk merupakan masyarakat yang hidup berkelompok-kelompok namun tinggal bersama dalam suatu wilayah tertentu, tetapi terpisah menurut garis budaya masing-masing. Kemajemukan suatu kelompok

masyarakat patut dilihat berdasarkan dua variabel, yakni kemajemukan sosial dan kemajemukan budaya. Kemajemukan sosial ditentukan indikator-indikator seperti kelas, status, lembaga, ataupun power. Kemajemukan budaya ditentukan oleh indikator-indikator genetik-sosial (ras, etnis, suku), budaya (kultur, nilai, kebiasaan), bahasa, agama, kasta, ataupun wilayah (Saad, 1980). Suatu masyarakat majemuk adalah suatu masyarakat dengan sistem nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya adalah sedemikian rupa sehingga para anggota masyarakat kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai keseluruhan, kurang memiliki homogenitas kebudayaan atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain (Manullang, 2019; Seru, 2020; Wasino, 2011)

Menurut Furnivall masyarakat majemuk adalah suatu masyarakat di mana sistem nilai yang dianut berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya membuat mereka kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai keseluruhan, kurang memiliki homogenitas kebudayaan atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain (Nasikun, 2003). Dengan demikian, masyarakat majemuk merupakan suatu masyarakat yang hidup secara berkelompok-kelompok secara terpisah berdasarkan suku, agama, ras dan kelas sosial dengan corak khas tertentu yang mencirikan masing-masing atau pada ragam budaya dan ragam sosial. Rasialis menjadi hal yang dilestarikan dalam masyarakat ini secara mendasar.

Menurut Pierre L. Van den Berghe menyebutkan beberapa karakteristik berikut sebagai sifat-sifat dasar dari suatu masyarakat majemuk, yaitu: (1) terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki sub-kebudayaan yang berbeda satu sama lain; (2) memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer; (3) kurang mengembangkan

konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar; (4) secara relatif seringkali mengalami konflik-konflik di antara kelompok yang satu dengan yang lain; (5) secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (*coercion*) dan saling ketergantungan dalam bidang ekonomi; serta (6) adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain (Nasikun, 2003).

b) Masyarakat Multikultur

Secara etimologis, multicultural berasal dari kata multikultural dan isme. Kata multicultural memiliki makna multi atau banyak budaya. Sementara itu tambahan (sufiks) isme memiliki makna ideologi, paham atau aliran. Dengan demikian dari pemaknaan ini berarti multikulturalisme memiliki makna ideologi atau paham tentang multi budaya (Wasino, 2011). Kata multikulturalisme pertama kali digunakan di Kanada tahun 1960-an. Perdana Menteri Kanada, Pierre Trudeau, menggunakannya untuk melawan konsep *biculturalism* (Jamrozik, 2004). Selanjutnya Furnivall mengatakan masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam suatu kesatuan politik (Furnivall, 2014).

Lebih lanjut, Masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat bersifat majemuk sejauh masyarakat tersebut secara struktur memiliki sub-sub kebudayaan yang bersifat deverseyang ditandai oleh kurang berkembangnya sistem nilai yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat dan juga sistem nilai dari satu-kesatuan sosial, serta seringnya muncul konflik-konflik sosial (Nasikun, 2003). Geertz mengatakan masyarakat multikultural adalah merupakan masyarakat yang terbagi dalam sub-sub sistem yang kurang lebih berdiri sendiri dan masing-masing sub sistem terkait oleh ikatan-ikatan primordial (C. Geertz, 2010; H. Geertz, 1981).

Dengan demikian, masyarakat multi-kultural adalah suatu kondisi masyarakat yang majemuk yang telah tercapai sebuah keteraturan dan keharmonisan dalam masyarakat. Pada masyarakat ini, dengan banyaknya diferensiasi sosial masyarakat tercipta suatu keharmonisan, saling menghargai, kesederajatan dan mempunyai kesadaran tanggungjawab sebagai satu kesatuan. Ciri-ciri masyarakat multikultur, yaitu: (1) Terjadi segmentasi, yaitu masyarakat yang terbentuk oleh bermacam-macam suku, ras, agama, pendidikan, ekonomi, politik, bahasa dan lain-lain tapi masih memiliki pemisah yang biasanya pemisah itu adalah suatu konsep yang di sebut primordial. (2) Memiliki struktur dalam lembaga yang non komplementer. (3) Konsensus rendah. (4) Integrasi dapat tumbuh dengan paksaan. (6) Adanya dominasi politik terhadap kelompok lain (Kusnanto, 2012). Sebab terjadinya multikulturalisme, yaitu: Pertama, faktor geografis di mana faktor ini sangat mempengaruhi apa dan bagaimana kebiasaan suatu masyarakat. Maka dalam suatu daerah yang memiliki kondisi geografis yang berbeda maka akan terdapat perbedaan dalam masyarakat (multikultural). Kedua, Pengaruh budaya asing di mana dalam hal ini mengapa budaya asing menjadi penyebab terjadinya multikultural, karena masyarakat yang sudah mengetahui budaya-budaya asing kemungkinan akan terpengaruh mind set mereka dan menjadikan perbedaan antara. Dan ketiga, kondisi iklim yang berbeda, maksudnya hampir sama dengan perbedaan letak geografis suatu daerah.

2. Sosial Budaya Indonesia

Nasionalisme Indonesia adalah sesuatu yang ditemukan, hal ini sebenarnya sudah ditegaskan oleh Sutan Takdir Alisjahbana yang kemudian berkembang dalam polemik kebudayaan. Indonesia kita bukan semata-mata kelanjutan Sriwijaya, Majapahit, Mataram, dan sebagainya, tetapi sesuatu yang baru ditemukan pada awal abad ke-20 (Lan & Manan, 2011). Suatu sistem sosial, pada dasarnya, tidak lain adalah suatu sistem daripada tindakan-tindakan. Ia terbentuk

dari interaksi sosial yang terjadi di antara berbagai individu, yang tumbuh dan berkembang tidak secara kebetulan, melainkan tumbuh dan berkembang di atas standar penilaian umum yang disepakati bersama oleh para anggota masyarakat (Nasikun, 2003).

Dengan ini, dapat dikatakan sistem sosial budaya Indonesia merupakan tindakan-tindakan yang terbentuk dari individu-individu secara alamiah dan menjadi standar nilai bersama suatu masyarakat dan dari maka proses budaya haruslah dibaca, diterjemahkan, dan diinterpretasikan.

Hal di atas sejalan dengan pendapat Wasino bahwa setiap masyarakat memiliki kebudayaan yang dijadikan pedoman dalam perilaku. Oleh karena dasar berpikir yang melatarbelakangi kebudayaan mereka berbeda-beda, maka wujud perilaku yang tampak dalam keseharian mereka juga tidak sama (Wasino, 2013). Hal itulah yang mempengaruhi adanya multibudaya dalam masyarakat dunia, termasuk Indonesia.

a) Pra Kemerdekaan (Jaman Penjajahan Hindia-Belanda)

Pemerintahan Hindia-Belanda yang berlangsung kurang dari 350 tahun itu bukannya meniadakan kontras antara Jawa dan Luar Jawa, melainkan membiarkannya demikian. Sebagaimana kita ketahui bersama, maka sejak abad ke-18 tekanan dari pada perdagangan Belanda berpindah dari daerah Maluku ke pulau Jawa (Nasikun, 2003). Sejak saat itu pengawasan pemerintah Hindia-Belanda terhadap daerah-daerah di luar Jawa menjadi lebih bersifat tidak langsung. Selanjutnya menurut Liem karena dilaksanakan politik etnis, yang banyak mendapatkan kesempatan memasuki pendidikan Barat adalah kebanyakan mereka yang berasal dari golongan elite tradisional. Oleh karena itu apabila usahawan-usahawan pribumi banyak muncul dari daerah-daerah luar Jawa, maka kaum birokrat justru lebih banyak tumbuh di pulau Jawa (Nasikun, 2003). Semua itu tetap merupakan faktor yang sangat memengaruhi persoalan hubungan-hubungan antara daerah di Indonesia sampai saat ini.

Berdasarkan tinjauan sejarah sebagian dari Negara-negara yang terfragmentasi secara ekstrim ditandai oleh sejarah masa lalu penaklukan oleh bangsa asing, yang diikuti oleh kolonialisme, perbudakan dan kerja paksa serta bentuk-bentuk segmentasi dan ketimpangan yang sangat terlembaga antara kelompok-kelompok etnis atau ras. Sebagian dari proses pembentukan awal ini meninggalkan jejak segmentasi dan kepluralan horizontal dan vertikal pada bentuk masyarakat tersebut setelahnya dengan berbagai implikasi secara sosial, budaya dan politik. Menurut Furnivall masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda adalah merupakan suatu masyarakat yang majemuk (*plural societies*), yakni suatu masyarakat yang terdiri atas dua elemen atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam satu kesatuan politik (Furnivall, 2014); (Nasikun, 2003). Menurut Wasino bahwa masyarakat ini (Indonesia) sebagai warisan sejarah sebelum kemerdekaan, yakni sejak zaman Hindia Belanda (Wasino, 2015). Selanjutnya Paeni dalam Ju Lan dan Manan mengatakan masalah otonomi daerah di Indonesia memang tak kunjung selesai mulai dari penerapan otonoda di masa pemerintahan Hindia pada 1906-1938 (Lan & Manan, 2011). Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua cirinya yang bersifat unik. Secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku-bangsa, perbedaan agama, adat serta perbedaan-perbedaan kedaerahan (Nasikun, 2003). Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam.

Dengan ini, menunjukkan bahwa sejak jaman penjajahan Hindia-Belanda dibentuk suatu masyarakat tertentu dari situasi yang telah terbentuk berdasarkan habituasi masing-masing. Dalam hal ini Hindia-Belanda menggunakan potensi yang ada

dalam masyarakat untuk memperkuat golongan-golongan dengan maksud tertentu, yang mengarahkan masyarakat Indonesia pada sifat yang majemuk.

b) Pasca Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka situasi masyarakat majemuk terus berlangsung. Berakhirnya Orde Baru telah membuka kotak pandora buruknya hubungan antar etnik dan antar agama. Akibatnya banyak terjadi konflik-konflik yang berdasarkan perbedaan etnik dan agama. Hal itu semakin meruncing ketika kepentingan-kepentingan politik masuk (Wasino, 2013). Proses reformasi politik melahirkan kesadaran baru tentang hubungan antar etnik dan agama. Lebih lanjut Ju Lan dan Manan mengatakan nasionalisme Indonesia sejatinya tidak bisa dilepaskan dari kenyataan Indonesia merupakan masyarakat yang plural dan multikultural dengan keanekaragaman dan kompleksitas budayanya (Lan & Manan, 2011).

Titik awal perubahan ini ketika Presiden Abdurahman Wahid membuka sekat-sekat hubungan multikultural yang menghormati perbedaan dalam orientasi budaya di kalangan etnik yang ada. Sejak itu konsep multikulturalisme mengalami proses sosialisasi dalam masyarakat Indonesia (Wasino, 2013).

Dengan demikian, menunjukkan bahwa setelah kemerdekaan Indonesia berada pada dua sisi kategori dalam ranah masyarakat majemuk dan masyarakat multikultural. Masyarakat Indonesia berada secara genetik-sosial (ras, etnis, suku), budaya (kultur, nilai, kebiasaan), bahasa, agama, kasta, dan wilayah yang beragam. Dengan perbandingan itu, satu sisi masyarakat Indonesia dapat dikategorikan masyarakat majemuk melihat realita sosial yang mengarah pada terjadinya sekat-sekat dan konflik secara vertikal. Sisi lain masyarakat Indonesia dapat dikategorikan masyarakat multikultural, dengan melihat pola hidup masyarakat dengan nilai toleransi, gotong royong, dan hubungan sosial masyarakat yang terjalin baik dan secara horizontal.

Lembaran sejarah kehidupan bangsa Indonesia sejak sebelum dan sesudah tagal 17 agustus 1945 penuh terisi dengan berbagai pertentangan. Melewati tahun 1945 pertentangan-pertentangan semacam itu justru terjadi di antara tokoh-tokoh dan kelompok-kelompok sosial-politik yang sebelum itu oleh hasrat pengabdian mereka kepada kepentingan bangsa telah mampu melupakan kepentingan masing-masing untuk saling bahu-membahu menciptakan kemerdekaan bangsa (Nasikun, 2003).

Konsep masyarakat majemuk untuk menamai keanekaragaman Indonesia berlangsung hingga Orde Baru. Pemerintah mengakui konsep tersebut dan mengemban politik asimilasi kebudayaan guna memecahkan persoalan etnisitas yang terjadi. Entis minoritas selalu diarahkan melakukan asimilasi budaya dengan etnis mayoritas, terutama terjadi pada masyarakat etnis Tionghoa (Wasino, 2013).

Struktur masyarakat Nusantara atau Indonesia sebelum kemerdekaan yang telah kita uraikan manimbulkan masalah tentang bagaimana masyarakat Indonesia memiliki kebudayaan nasional. Pluralitas masyarakat Indonesia yang bersifat multi-dimensional telah menimbulkan permasalahan bagaimana masyarakat Indonesia memberi bentuk integrasi nasional yang bersifat vertikal secara horizontal, sementara sisi lain stratifikasi sosial memberi bentuk integrasi nasional yang bersifat vertikal. Hal ini menghadapkan Indonesia pada arah anantara masyarakat majemuk masyarakatmultikultural. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan tingkat keanekaragaman yang sangat kompleks. Masyarakat dengan berbagai keanekaragaman tersebut dikenal dengan istilah masyarakat multikultural.

Hubungan multikultur yang harmonis menjadi terganggu pada masa Kolonialisme Belanda. Penguasa Belanda membawa budaya Barat sebagai simbol dominasi (Wasino, 2013). Pada dasarnya, multikulturalisme yang terbentuk di Indonesia merupakan akibat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Menurut kondisi geografis, Indonesia memiliki banyak pulau

dimana stiap pulau tersebut dihuni oleh sekelompok manusia yang membentuk suatu masyarakat. Dari masyarakat tersebut terbentuklah sebuah kebudayaan mengenai masyarakat itu sendiri. Tentu saja hal ini berimbang pada keberadaan kebudayaan yang sangat banyak dan beraneka ragam.

Ada kesenjangan antara internalisasi nilai yang belum jadi lalu lumpuh dan keterpaksaan mengunyah rekayasa birokrasi pemerintahan kolonial. Di Indonesia, di satu pihak merupakan konsep kesadaran baru; dan di lain pihak, belum di akarkan dalam proses transformasi budaya (masih berupa konsep politis) (Sutrisno & Putranto, 2005).

Terdapat kaitan yang erat Konsep multikulturalisme bagi pembentukan masyarakat. Konsep tersebut berlandaskan pada Hhineka Tunggal Ika dan upaya mewujudkan kebudayaan nasional sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terjadi berbagai hambatan yang secara langsung menghalangi terbentuknya masyarakat multikulturalisme.

Terjadinya neo-Feodalisme dalam ekonomi, politik, dan kebudayaan di Indonesia, sehingga demokrasi pun dihayati dengan semangat nilai feodal dan peternalistik, transformasi budaya menghasilkan involusi budaya di mana dualism feudal modern terus-menerus menjadi kendala proses integrasi budaya maupun nilai (H. Geertz, 1981); (Sutrisno & Putranto, 2005).

Masa Orde Baru dihadapkan dengan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang ditafsirkan sebagai simbol budaya yang harus dihargai. Permasalahannya ketika tafsir tersebut dijadikan indoktrinasi politik negara yang membuat pihak-pihak pendukung budaya harus mengikuti tafsiran tersebut. Lebih lanjut, terjadi pengabaian akan keberadaan multikulturalisme. Tafsiran tersebut memunculkan anggapan perlawanan dari kelompok yang tidak pendukung budaya tersebut. Perlawanan itu menjadi anti klimak pasca lengsernya Suharto yang berdampak pada ancaman disintegrasi bangsa. Proses menyatukan cara berpikir ke dalam Indonesia sering menimbulkan problem-problem benturan budaya.

Realitas masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang multi etnik dengan penduduk sekitar 226 juta pada akhir Orde Baru, adalah sebuah masyarakat multikultural. Ada sekitar 300 etnis dan bahasa yang berbeda dalam hal ini kelompok "negara kepulauan terbesar di dunia" (Wasino, 2011). Dari agama misalnya bahwa pada tahun 1986 99,4% dari penduduk Indonesia adalah penganut empat agama utama dunia, diantaranya Islam (86,9 %), Buddha (0,6%) Hindu, (1%), Protestan (6,5%), dan Katolik (3,1%), dan (Wasino, 2011). Hal ini juga multikultural dalam arti bahwa pedesaan tradisional, pesisir dan masyarakat suku hidup berdampingan dengan masyarakat kota metropolitan yang juga termasuk multikultural yang berorientasi pada global pasca-modern atau budaya modern.

Keragaman budaya penduduk dari berbagai tempat, banyak diakibatkan oleh migrasi, seperti migrasi antar pulau, migrasi desa ke kota, dan migrasi pekerja asing di belakang investasi dan bantuan asing atau migrasi warga asing telah menyebabkan semakin etnis, agama, dan keanekaragaman ras dan pergeseran dalam komposisi etnis dan agama penduduk di daerah. Heterogenitas dalam komposisi penduduk daerah-daerah ini sering menyebabkan persaingan yang berujung pada konflik dalam bidang-bidang tertentu. Pada masa Orde Baru sampai menjelang reformasi telah terjadi banyak kekerasan atas nama etnik dan agama.

Gerakan separatis bersenjata terus terjadi berlarut-larut bahkan mengancam integritas teritorial bangsa Indonesia. Gerakan-gerakan regional dan lokal oleh kekuatan-kekuatan sosial tertuju pada pecahnya beberapa provinsi dan, sebagai konsekuensinya, peningkatan homogenitas etnis penduduk masing-masing propinsi baru. Belakangan ini peningkatan primordial provinsialisme dan perkembangan lebih lanjut bisa melemahkan integrasi sosial nasional Indonesia. Persoalan-persoalan primordialisme dan konsep multikulturalisme menjadi isu penting untuk disebarluaskan di Indonesia. Hal ini menjadi urgen mengingat pasca runtuhnya rezim otoritarianisme Orde Baru hingga menuju masyarakat demokratis

yang harus didukung oleh tatanan masyarakat yang demokratis serta menghargai perbedaan paham budaya. Pemikiran ini sesungguhnya merupakan wujud penguatan kembali pemikiran para pendiri bangsa ini menuju masyarakat Indonesia yang bersatu dan menghilangkan perbedaan sosial berdasarkan warna kulit, tingkatan sosial, agama, dan suku bangsa.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Perbandingan sistem sosial budaya Indonesia pada zaman penjajahan belanda dan setelah kemerdekaan. Perbedaannya adalah pada penggunaan istilah masyarakat majemuk dan masyarakat multicultural di lihat dari segi perubahan masyarakat. Masyarakat majemuk merupakan suatu masyarakat yang hidup secara berkelompok-kelompok secara terpisah berdasarkan suku, agama, ras dan kelas sosial dengan corak khas tertentu yang mencirikan masing-masing atau pada ragam budaya dan ragam sosial. Rasialis menjadi hal yang dilestarikan dalam masyarakat majemuk secara mendasar. Masyarakat multikultural di sini dapat dikatakan kondisi masyarakat yang majemuk namun telah tercapai tatanan yang teratur dan harmonis. Pada masyarakat multikultural, dengan banyaknya perbedaan secara sosial masyarakat namun tercipta suatu keharmonisan, saling menghormati dan menghargai, kesederajatan dan memiliki kesadaran tserta tanggungjawab sebagai suatu kelompok masyarakat dalam satu-kesatuan. Secara vertikal struktur masyarakat di Indonesia ditandai dengan adanya perbedaan-perbedaan vertikal diantara masyarakat lapisan atas dan lapisan bawah yang dirasakan cukup tajam. Pada jaman penjajahan Hindia-Belanda selalu diupayakan memperkuat dan dibentuk lagi masyarakat Indonesia berdasarkan habituasi masing-masing. Hindia-Belanda menggunakan potensi yang ada di dalam masyarakat untuk memperkuat golongan-golongan dengan maksud tertentu, yang mengarahkan masyarakat Indonesia pada sifat yang majemuk.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami sampaikan kepada rekan sejawat, pemilik buku dan artikel yang kami gunakan sebagai referensi sehingga tulisan ini selesai tepat waktu sesuai target kami.

REFERENSI

- Al-Ghaaruty, F. (2010). Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Sains Dan Inovasi*.
- Farida, I. (2010). Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Sains Dan Inovasi*.
- Furnivall, J. S. (2014). *Colonial policy and practice*. Cambridge University Press.
- Gani, A. A., & Saddam, S. (2020). Pembelajaran Interaktif Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Mobile Learning di Era Industri 4.0. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(1), 36–42.
- Geertz, C. (2010). *The Near East in the Far East. Life among the Anthros and Other Essays*, 169–184.
- Geertz, H. (1981). *Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia* (terj.). Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial & FS UI.
- Giannantonio, C. M. (2010). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (2nd ed.). *Organizational Research Methods*.
- Jamrozik, A. (2004). *The chains of colonial inheritance: searching for identity in a subservient nation*. UNSW Press.
- Khatibah, K. (2011). Penelitian kepustakaan. *Iqra': Jurnal Perpustakaan Dan Informasi*, 5(01), 36–39.
- Koentjaraningrat. (2010). "Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia." Djambatan.
- Krippendorff, K. (2010). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (2nd ed.). *Organizational Research Methods*.
- Lan, T. J., & Manan, M. (2011). *Nasionalisme dan Ketahanan Budaya di Indonesia: Sebuah Tantangan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Manullang, M. (2019). Misi dalam Masyarakat Majemuk. *Jurnal Teologi Cultivation*, 3(2), 49–63.
- Mirzaqon, A. T., & Purwoko, B. (2017). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing Library. *Jurnal BK UNESA*.
- Mirzaqon T, A. (2017). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing. *Jurnal BK Unesa*, 8(1).
- Nasikun. (2003). *Sistem Sosial Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Noorzeha, F., Fil, S., Noorzeha, F., & Fil, S. (2020). *PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN*.
- Rahardjo, H. M. (2010). *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*.
- Rani, K., & Purwoko, B. (2012). *LIBRARY RESEARCH OF THE BASIC THEORY AND PRACTICE OF NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING COUNSELING* Rani. *Journal Marketing*.
- Ruslan, I. (2020). *Kontribusi Lembaga-Lembaga Keagamaan dalam Pengembangan Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia*. Arjasa Pratama.
- Saad, I. (1980). *Competing identities in a plural society: The case of peninsular Malaysia*. Institute of Southeast Asian.
- Seru, S. (2020). *Pengembangan Apologetika Kontekstual Untuk Memberitakan Kabar Baik Kepada Masyarakat Majemuk*.
- Shelley, M., & Krippendorff, K. (1984). *Content Analysis: An Introduction to its Methodology*. *Journal of the American Statistical Association*. <https://doi.org/10.2307/2288384>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan: (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*. Alfabeta.
- Suharsimi, A. (2013). *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 201:274.
- Suparlan, P. (2004). *Masyarakat Majemuk, Masyarakat Multikultural, dan Minoritas: Memperjuangkan Hak-hak Minoritas*. Makalah Dalam Workshop Yayasan Interseksi, Hak-Hak Minoritas Dalam Landscape Multikultural, Mungkinkah Di Indonesia.
- Suparlan, P. (2014). *Menuju masyarakat Indonesia yang multikultural*. *Antropologi Indonesia*.
- Sutrisno, M., & Putranto, H. (2005). *Teori-teori kebudayaan*. Kanisius.
- Umanailo, M. C. B., Nawawi, M., & Pulhehe, S. (2018). *Konsumsi Menuju Konstruksi Masyarakat Konsumtif*. *Simulacra*, 1(2), 203–212.
- Wafi, M. S. (2017). *Islam dan Nasionalisme dalam Konstruksi NKRI*.
- Wasino. (2011). *Multikulturalisme dalam Perspektif Sejarah Sosial*. *Seminar Multikulturalisme Dan Integrasi Bangsa Dalam Pembangunan Kebudayaan Dan Pariwisata (Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata)*.
- Wasino. (2015). *Modernisasi Budaya Politik Mangkunegaran*. *Sejarah Dan Budaya*.
- Wasino, W. (2013). *Indonesia: from Pluralism to Multiculturalism*. *Paramita: Historical Studies Journal*, 23(2), 3.
- Zed, M. (2014). *Metode peneletian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.